

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016”.
- Badan Pemeriksa Keuangan. “Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016”.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bird, Ricard M., dan Francois, Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Edisi dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darto, M. 2005. “Otonomi Daerah, *Civil Society* dan Kemandirian Daerah, Telaah Ulang Otonomi Daerah Perspektif Sosial–Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi dan Kemasyarakatan*. Vol. 3, No. 1, hh. 8--21.
- Ekawati, Fauziah. 2016. “Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah di Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 4, No. 2.
- Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kabupaten Lamandau, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kabupaten Lamandau, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

- Kementerian Keuangan. Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kurniawan, A., dkk. 2017. “Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X”. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Udayana. Vol. 6, No. 10.
- Laili, Amin. 2014. *PBB Sektor Keenam Sebagai Pajak Pusat*. Dilihat tanggal 20 Juli 2017. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).)
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah: dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FHH UII Press.
- Prasetyo, S., dkk. 2015. “Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah di Kota Probolinggo (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 6, No. 2.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2003. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sunyoto & Ery Hidayanti. 2011. “Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menjadi Pajak Daerah; Antara Peluang dan Tantangan:. *Jurnal WIGA*.  
Vol.2, No.2.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wahyudi, Eddi. 2012. [\*Studi Kasus Devolusi PBB P2: Peluang dan Tantangan bagi Pemda Kabupaten/Kota\*](#). Dilihat tanggal 10 Juli 2017. ([www.eddiwahyudi.com](http://www.eddiwahyudi.com))